

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari rangkaian pembangunan Kabupaten Wonosobo yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan visi “Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera untuk Semua”. Dari visi tersebut terlihat secara jelas arah tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yaitu terciptanya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera di segala bidang yang akan diraih melalui pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk menjabarkan visi tersebut dalam kerangka operasional, maka diuraikan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, melalui pelaksanaan program kerja pemerintah daerah selama lima tahun. Adapun hubungan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 :

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara		
Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan	1 Meningkatkan nilai demokrasi serta kesadaran kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Indeks Demokrasi
	2 Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Indeks Toleransi
	3 Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	Indeks Gotong Royong
	4 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Rasa Aman

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik.	1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 3: Meningkatkan kemandirian daerah		
Meningkatkan produktivitas, Kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah	1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 3. Nilai Tukar Petani 4. Laju Inflasi 5. Pertumbuhan Ekonomi 6. Indeks ketahanan pangan
	2. Meningkatnya daya saing daerah	1. Produktivitas daerah 2. PDRB per kapita (juta rupiah) 3. Indeks kapasitas fiskal daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata		
Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	1. Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Rata – rata lama sekolah 3. Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-45 tahun 4. Rata – rata usia harapan hidup 5. Angka kematian ibu 6. Angka kematian bayi 7. Prevalensi balita gizi kurang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		8. Prevalensi balita gizi buruk 9. Persentase KK yang mendapatkan akses sanitasi dasar 10. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang
	2 Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3. Prevalensi kekerasan terhadap anak 4. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> 5. <i>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</i> 6. Persentase Penduduk Berakte Kelahiran 7. Presentase Penduduk Ber KTP
	3 Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	1. Indeks Gini 2. Indeks Wiliamson
	4 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan	1. Persentase angka kemiskinan 2. Indeks kedalaman kemiskinan 3. Indeks keparahan kemiskinan
	5 Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 3. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) 4. Tingkat Kesempatan Kerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah		
Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antar kelompok dan antar generasi.	1. Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 2. Ketaatan terhadap RTRW
	2. Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan keseimbangan dan keadilan.	1. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga
	4. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	1. Indeks Resiko Bencana

Tabel 4.2
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.a. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Peningkatan nilai- nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat	Mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi
	Penguatan implementasi kebijakan pelaksanaan Wonosobo Ramah HAM	Meningkatkan kesadaran tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM
1.b. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat
		Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan
		Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung toleransi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.c. Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	Meneguhkan kembali budaya gotong royong sebagai sikap hidup masyarakat	Memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menempatkan penduduk sebagai basis sentral pembedayaan dan prioritas pembangunan
1.d .Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Penguatan pranata sosial dan pengembangan kemitraan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini	Memperkuat pranata sosial melalui kemitraan pemerintah, lembaga dan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan
	Transformasi kebijakan fungsi penegakan Perda	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara proaktif
		Mengembangkan metode penegakan Perda secara lebih partisipatif
	Pengembangan sistem pendukung untuk penanganan gangguan keamanan dan peningkatan ketangguhan masyarakat	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Membangun data basis terintegrasi sebagai sistem penopang perencanaan
		Menguatkan kapasitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif
	Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana	Membangun kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
		Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan eifisien

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Penataan Manajemen SDM	Membangun sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
	Mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi
	Membangun dan mengembangkan sistem prosedur serta tata kerja birokrasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Mengembangkan sistem penopang pemerintahan dan birokrasi berbasis TIK
		Peningkatan kemudahan dan akses layanan melalui pelayanan terpadu
	Menguatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan profesional
		Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
		Mengembangkan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
		Mengembangkan statistik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		Optimalisasi pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi
		Mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan untuk menunjang akuntabilitas
		Mengembangkan birokrasi yang egaliter dan berintegritas

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan kemitraan hubungan dengan beberapa elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan
3.a. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan	Peningkatan Kualitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata kelola lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan
		Mengembangkan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha
	Peningkatan dan pengembangan pertanian terpadu	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
		Meningkatkan produksi hasil peternakan dan populasi ternak
		Meningkatkan kelembagaan pertanian
	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta pemberdayaan petani ikan	Meningkatkan produksi perikanan
	Peningkatan dan pengembangan ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian	Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan input produksi
		Meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi
	Peningkatan kualitas produk daerah	Mengembangkan ekspor dan meningkatkan mutu komoditas ekspor
		Mengembangkan industri hulu hilir
	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Menciptakan iklim usaha yang kondusif
	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan kemandirian pangan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mendorong konsumsi pangan lokal yang mendukung usaha pertanian
3.b. Meningkatnya daya saing daerah	Penciptaan iklim kreatif, inovatif dan jiwa kewirausahaan yang berorientasi kemajuan	Mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi berkelanjutan
		Mengarahkan litbang daerah sebagai salah satu penopang kemandirian daerah
		Mewujudkan Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal (<i>agro-eco-culture-tourism</i>)
	Peningkatan kapasitas fiskal	Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
		Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah
	Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan investasi dan pengembangan ekonomi	Meningkatkan kemudahan, perlindungan dan kepastian berusaha
		Mengembangkan sistem penopang untuk kemudahan informasi bisnis dan investasi
	Peningkatan karakter berprestasi dan mandiri serta menghargai nilai budaya	Meningkatkan budaya baca dan cerdas bermedia
		Menumbuhkan budaya olahraga dan berprestasi masyarakat
		Menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dan identitas Wonosobo
4.a Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Percepatan pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi	Meningkatkan dan pemeratakan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	masyarakat	Meningkatkan mutu layanan pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi
		Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan
		Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi penduduk usia dewasa
	Pemenuhan layanan dasar kesehatan bagi masyarakat	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan
		Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu tenaga kesehatan
		Meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan
		Meningkatkan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan
	Pemenuhan layanan dasar sosial bagi masyarakat	Menyelenggarakan perlindungan sosial secara komprehensif
		Memperkuat peran kelembagaan sosial
	Pemenuhan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat	Menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (<i>backlog</i>)
		Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman
		Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemenuhan layanan dasar Pekerjaan Umum bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi)
4.b. Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja
	Peningkatan kesetaraan, keadilan gender dan pemenuhan hak anak	Mengarusutamakan gender dan hak anak dalam pembangunan
		Meningkatkan kapasitas perempuan
	Pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Mengembangkan model pendidikan ramah anak
	Optimalisasi pengendalian kuantitas dan persebaran penduduk melalui pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga	Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses layanan KB
		Meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan dan partisipasi
		Peningkatan KIE dan peran peer to peer grup remaja dalam peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS
	Penjaminan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan adminduk capil	Memperluas akses dan prosedur pelayanan adminduk dan capil
4.c. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Pemerataan pembangunan wilayah	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		Memperbesar aksesibilitas wilayah
		Pengembangan pusat pertumbuhan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kawasan	Menciptakan desa pusat pertumbuhan
	Penataan sistem transportasi	Mengembangkan sistem transportasi yang efisien tataran transportasi lokal (tatralok)
		Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang layak
4.d. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu
		Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masy miskin dan kurang mampu
4.e. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja	Peningkatan akses ketrampilan serta optimalisasi pengelolaan aset masy miskin dan sumberdaya lokal
		Meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi masyarakat kelompok rentan
	Peningkatan akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi	Meningkatkan kemudahan akses permodalan termasuk berbagai skema kredit untuk usaha mikro dan rumah tangga
	Penguatan pemberdayaan masyarakat	Mereformulasi upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan dan potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif desa
		Menerapkan <i>One District One Product (ODOP)</i> dan <i>One Village One Product (OVOP)</i> sebagai basis pengembangan potensi lokal
5.a Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan	Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
berkesinambungan	lingkungan dan sumber daya alam secara rasional berdasarkan prinsip berkelanjutan	Menerapkan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup
		Adopsi dan pengarusutamaan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam <i>assessment program</i>
	Meningkatkan pengelolaan persampahan secara partisipatif	Meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk memperluas cakupan layanan persampahan
	Penerapan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) sebagai salah satu prinsip pembangunan	Meningkatkan kualitas/praktek pertanian ramah lingkungan
	Transformasi perspektif perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman kekayaan hayati dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Mengembangkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta memperluas upaya pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
5.b. Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan;	Peningkatan ketersediaan energi	Peningkatan elektrifikasi rumah tangga
	Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi	Optimalisasi Pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif untuk energi baru dan terbarukan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan energi yang menerapkan prinsip hemat energi
5.c. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Peningkatan kemampuan adaptasi dan upaya mitigasi bencana	Pengurangan resiko bencana

B. Prioritas Pembangunan 2017

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. **Visi tersebut adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**, yang dilakukan melalui **7 misi pembangunan** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut **"Nawa Cita"**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk **melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman** kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun **tata kelola pemerintahan** yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam **melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum** yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan **kualitas hidup manusia dan masyarakat** Indonesia;
6. Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan **sektor-sektor strategis** ekonomi domestik;
8. Melakukan **revolusi karakter bangsa**;
9. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu
4. Indeks Gini sebesar 0,36
5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0-5,0%

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari RPJMN Tahun 2015-2019. dilaksanakan dalam rangka **Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah**”.

2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017

Tahun 2017 yang merupakan tahun keempat RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ditujukan untuk **“Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah”**. Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tahun 2017 tersebut, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi **prioritas pembangunan tahun 2017**, meliputi :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan.
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin.
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan.
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra /klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan terutama untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan dan energi serta percepatan

pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 lebih ditujukan pada upaya-upaya antara lain:

- a. peningkatan produktivitas kedelai dan garam;
- b. program pembangunan 1000 embung melalui peningkatan kuantitas dan kualitas embung/tampungan air;
- c. peningkatan jaringan irigasi;
- d. pengembangan energi baru terbarukan;
- e. pemberian bantuan siswa miskin untuk pendidikan menengah dan khusus;
- f. pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN;
- g. peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- h. penanganan infrastruktur pendukung pariwisata dan pengurangan kemiskinan;
- i. penanganan lahan kritis.